

Analisis : Persimpangan Etika dan Paradigma Pemerintahan

Analisis ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah

PANCASILA

Dosen Pengampu : Bpk. Roy Kembar Habibi M. Pd,



Disusun oleh :

1. Helcha Nur Sabila Putri (2553053025)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas analisis ini dengan baik. Analisis ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : Bpk. Roy Kembar Habibi selaku dosen matkul Pancasila, serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi dalam penyelesaian analisis ini. Penulis menyadari bahwa analisis ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua.

Metro, 11 November 2025

HELCHA NUR SABILA PUTRI

Analisis Artikel “Persimpangan Etika dan Paradigma Pemerintahan”

1. Latar Belakang Masalah

Artikel ini membahas kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia yang menghadapi krisis etika dan paradigma dalam menjalankan tugasnya. Meskipun reformasi telah membuka peluang untuk demokratisasi dan transparansi, dalam praktiknya birokrasi masih terjebak dalam budaya lama yang kaku, paternalistik, dan sarat kepentingan politik.

Reformasi memang membawa perubahan struktur pemerintahan, tetapi tidak diikuti perubahan nilai dan etika aparatur. Hal ini menyebabkan birokrasi masih terkesan lambat, koruptif, dan kurang melayani kepentingan publik.

2. Pokok Permasalahan

Terdapat dua masalah utama yang dikaji penulis:

Persimpangan etika pemerintahan, yaitu hilangnya nilai moral dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Paradigma pemerintahan yang keliru, yaitu masih bertahannya pola pikir birokrasi lama yang lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan.

Kedua hal tersebut berimplikasi pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meluasnya praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

3. Aspek Etika yang Dilanggar

Penulis menjabarkan beberapa prinsip etika pemerintahan yang seharusnya dipegang teguh namun justru sering diabaikan:

Prinsip Etika Pemerintahan Makna dan Pelanggaran yang

Terjadi Independence Pegawai birokrasi seharusnya bebas dari tekanan politik, tetapi sering justru terjebak dalam kepentingan elite. Impartiality Netralitas pelayanan publik

tidak dijaga; birokrasi sering berpihak pada kelompok tertentu. Integrity Integritas moral dan kejujuran menurun; korupsi dan manipulasi masih

terjadi. Transparency Kurangnya keterbukaan keuangan dan akuntabilitas

menyebabkan publik kehilangan kepercayaan. Efficiency Banyak anggaran publik

yang boros dan tidak tepat sasaran. Professionalism Kompetensi dan tanggung jawab

aparatur rendah. Service-mindedness Pelayanan publik sering tidak memuaskan karena rendahnya empati terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Dampak yang Timbul

Menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintah.

Munculnya budaya kerja yang koruptif dan oportunistik.

Rendahnya kinerja pelayanan publik yang menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik.

Stagnasi reformasi birokrasi, karena perubahan hanya terjadi pada struktur, bukan mentalitas.

5. Strategi dan Solusi yang Ditawarkan

Penulis menawarkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi krisis etika dan paradigma birokrasi:

Mengubah paradigma pelayanan publik dari paternalistik menjadi egaliter, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, bukan hanya cepat, tapi juga tepat dan transparan.

Menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja (merit system) agar pegawai termotivasi untuk bekerja profesional.

Membuka ruang kritik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab agar proses birokrasi tidak berbelit.

Menumbuhkan sense of purpose dan sense of crisis, yaitu kesadaran akan pentingnya perubahan nilai dan mental birokrasi.

6. Kesimpulan

Krisis birokrasi di Indonesia bukan hanya soal struktur, tetapi terutama masalah etika dan paradigma berpikir. Reformasi politik tanpa reformasi moral hanya akan melahirkan sistem baru dengan perilaku lama. Oleh karena itu, perbaikan harus dimulai dari perubahan nilai dasar, integritas, dan tanggung jawab moral aparatur negara.

7. Keterkaitan dengan Nilai Pancasila

Nilai-nilai etika pemerintahan yang dibahas sangat sejalan dengan sila-sila Pancasila, khususnya:

Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) → menuntut aparatur bertindak jujur dan adil.

Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) → menghindari kepentingan kelompok atau partai.

Sila ke-5 (Keadilan Sosial) → menegaskan pentingnya pelayanan publik yang adil bagi seluruh rakyat.

Namun dalam praktiknya, penerapan nilai Pancasila masih jauh dari harapan, karena etika publik sering dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan.